

BAB III
PERUBAHAN ORIENTASI POLITIK
MASYARAKAT AIR TIRIS
TERHADAP PARTAI-PARTAI POLITIK ISLAM

Sampai pemilihan umum 2014, dari sepuluh kali pemilihan umum, yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1999, 2004, 2009 dan 2014, pemerintah Orde Baru telah melaksanakan pemilihan umum sebanyak enam kali dan empat kali pemilihan umum terakhir dilaksanakan oleh pemerintah reformasi. Dalam pada itu telah terjadi transformasi struktur politik cukup mendasar. Pada pemilihan umum 1971 diikuti oleh sepuluh organisasi peserta pemilu (OPP), termasuk di dalamnya adalah partai-partai politik berdasarkan agama, pemilihan umum 1977 hanya diikuti tiga OPP dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai fusi dari empat partai Islam, demikian pula pada pemilihan umum 1982. Pada pemilihan umum 1987 masih diikuti oleh tiga OPP, tetapi PPP yang sebelumnya berdasarkan Islam dipaksa melepaskan dasar Islam itu setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985, demikian pula pada pemilihan umum 1987, 1992 dan 1997. Sementara itu pemilihan umum tahun 1999, 2004, 2009 dan 2014 diikuti oleh lebih dari dua puluh OPP walaupun hanya menghasilkan kurang dari sepuluh OPP yang memperoleh kursi di parlemen.

Dalam bab III ini dipaparkan tentang perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris terhadap partai politik Islam pada pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014. Pada pemilihan umum 1971 partai politik Islam terdiri dari empat partai politik, yaitu NU, Parmusi, PSII, dan Perti. Pada pemilihan umum 1973, 1977, 1982, 1987, 1992 dan

1997, PPP merupakan satu-satunya partai Islam, walaupun pada pemilihan umum 1987, 1992 dan 1997 PPP secara formal bukan partai Islam. Pada pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014 bermunculan partai-partai politik Islam, selain PPP, seperti PBB, PKS, PBR, PAN, PKB, dan lain-lain.

Secara tradisional masyarakat Air Tiris adalah masyarakat yang religius, masyarakat santri, yang memilih partai-partai Islam dalam setiap pemilihan umum, sampai dengan pemilihan umum 2004. Pada pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014, dua kali pemilihan umum dimenangkan partai politik Islam dan dua kali pemilihan umum berikutnya dimenangkan partai-partai politik non keagamaan. Partisipasi politik yang tinggi dari masyarakat Air Tiris diwarnai oleh perubahan orientasi politik masyarakat yang dinamis, dari berorientasi terhadap partai politik Islam kemudian berubah bergeser berorientasi partai politik non keagamaan.

3.1. Masyarakat Air Tiris

Kondisi sosial politik masyarakat kelurahan Air Tiris yang seratus persen beragama Islam merupakan basis dari organisasi kemasyarakatan religius seperti Muhammadiyah dan Perti (Persatuan Tarbiyah Islamiah). Pada masa Orde Baru masyarakat kelurahan Air Tiris sering disebut masyarakat yang tergolong fanatik. Hal ini ditandai dengan gigihnya masyarakat memegang teguh nilai-nilai yang diyakininya baik dan benar. Dengan demikian nilai-nilai baru yang datang tidak mudah mempengaruhi masyarakat. Pada masa lalu wilayah kelurahan Air Tiris dapat dikatakan

sebagai basis Partai Persatuan Pembangunan (PPP)¹. Hal ini disebabkan oleh terutama pamor H. Muhammad Amin, seorang perintis kemerdekaan yang kebetulan pimpinan PPP. Sebagian besar pengurus Muhammadiyah dan Perti menjadi pengurus dan pendukung PPP. Kondisi ini juga disebabkan oleh perilaku para birokrat atau kader Golkar yang kurang berkenan di hati masyarakat Air Tiris. Namun keadaan menjadi berubah pada pemilihan umum era reformasi. Sebagai gambaran, pada pemilihan umum 1992 suara PPP menang tipis, di atas suara Golkar dan PDI.

Pada pemilihan umum 1997 Golkar menang dengan mendapat perolehan suara mayoritas, disusul PPP dan PDI. Pada pemilihan umum 1999 PAN berada pada urutan pertama perolehan suara, disusul PPP, Golkar, PBB, PK, PDIP dan lainnya. Pada pemilihan umum 2004 PBR berada pada urutan pertama perolehan suara, disusul, PPP, Golkar, PBB, PKS, PAN dan PDIP. Pada pemilihan umum 2009 partai Golkar kembali berada pada urutan pertama perolehan suara, disusul PAN, PPP, PBB, PKS, dan PDIP. Pada pemilihan umum 2014 partai Golkar semakin kokoh berada pada urutan pertama perolehan suara, disusul Partai NasDem, PKB, PAN, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PPP, PKS, PDIP, PBB, Partai Hanura dan PKPI.

Sekalipun terjadi perbedaan dalam memilih partai, para pendukung partai baik yang menang maupun yang kalah tetap terjalin hubungan yang harmonis. Dalam upaya merebut simpati masyarakat, berbagai kegiatan diadakan oleh masing-masing partai. Contoh nyata adalah Partai Bintang Reformasi yang melaksanakan tabligh akbar

¹Wawancara dengan Amri Yudo, mantan Lurah Air Tiris, Oktober 2012

dengan mendatangkan mubaligh kondang yang juga ketua umum PBR yakni K.H. Zainuddin MZ. Gerak jalan santai dilaksanakan oleh Golkar. Pada dua kegiatan tersebut disambut baik oleh para konstituennya dan berjalan dengan aman, tertib, tanpa saling memburukkan².

Sisi kehidupan sosial keagamaan dan sarana pendidikan menunjukkan bahwa masyarakat Air Tiris adalah masyarakat yang taat menjalankan syariat Islam. Masyarakat Air Tiris terkenal sebagai masyarakat yang fanatik dan kuat memegang nilai-nilai agama dan adat istiadat. Pada dua dasawarsa terakhir mulai menerima pengaruh nilai-nilai luar, seiring dengan letak geografis kelurahan Air Tiris yang berada di jalan negara Pekanbaru-Sumatra Barat dan berada di pusat kota kecamatan. Hal ini secara tidak langsung tentu dengan mudah menerima transformasi budaya yang datang. Selain itu pengaruh media elektronik juga ikut mempengaruhi karakteristik pribadi masyarakat kelurahan Air Tiris. Dalam perkembangannya, dapat dikatakan, bahwa kultur masyarakat kelurahan Air Tiris berada antara dua budaya desa dan kota. Efek utama perubahan yang dapat dilihat adalah mulai berkurangnya budaya kerja sama atau gotong-royong.

Berkaitan dengan pendidikan, kelurahan Air Tiris termasuk daerah yang memiliki lembaga pendidikan yang cukup lengkap. Lembaga pendidikan yang terdapat di kelurahan Air Tiris meliputi lembaga pendidikan agama dan umum. Kelurahan Air Tiris memiliki 2 buah TK, 3 buah SD, 6 buah MDA, 2 buah SLTP, 2 buah SLTA, 2 buah Lembaga

²Wawancara dengan Syafii Samosir, tokoh partai Golkar di Air Tiris, Oktober 2012

Kursus dan 17 buah TPA. Di samping itu, terdapat satu buah pondok pesantren. Masyarakat Air Tiris diselimuti oleh sarana ibadah, wilayah yang terdiri 6 RW itu memiliki 6 buah masjid dan 18 buah surau.

Lembaga pendidikan yang diwarnai oleh agama cukup mendominasi, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kelurahan Air Tiris merupakan masyarakat religius. Jika dikaitkan dengan dinamika politik, maka kondisi ini jelas menguntungkan bagi partai politik yang berbasiskan keislaman. Dinamika politik di kelurahan Air Tiris menunjukkan semangat dan kegairahan masyarakat akan kehidupan politik. Terdapat tujuh partai politik yang memiliki tokoh cukup mapan, yaitu Golkar, PPP, PAN, PBB, PKS, PBR, dan PDIP. Para elit politik tersebut memiliki berbagai latar belakang yang berbeda, baik dari segi pendidikan, status sosial maupun latar belakang partainya. Dari 14 orang elit politik yang terdapat di kelurahan Air Tiris, 3 orang merupakan fungsionaris partai Golkar, 2 orang fungsionaris PBR, 3 orang fungsionaris PAN, 1 orang fungsionaris PPP, 1 orang fungsionaris PKS, 3 orang fungsionaris PBB, dan 1 orang fungsionaris PDIP.

Secara ekonomi, tokoh-tokoh ini termasuk ekonomi menengah ke atas dengan berbagai latar belakang pekerjaan, seperti petani, pedagang, pegawai negeri maupun pensiunan pegawai negeri. Sementara dari segi latar belakang pendidikan, rata-rata tingkat SLTA dan Sarjana Strata Satu, dengan pendidikan agama rata-rata mengenyam pendidikan pondok pesantren.

3.2. Partai-partai Politik di Air Tiris

Partai politik Islam yang menjadi objek pembahasan ini adalah partai politik yang secara tegas mencantumkan asasnya adalah Islam. Pada pemilu 1997 tidak terdapat partai Islam, sementara pada pemilu tahun 1999, paling tidak ada delapan partai yang berasaskan Islam, antara lain yang mendapatkan kursi di DPR pada pemilihan umum 1999 adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), Partai Nahdhatul Ummat (PNU), Partai Kebangkitan Ummat (PKU), Partai Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan lain-lain. Di samping partai yang berasaskan Islam, ada juga partai yang bebasiskan massa Islam, yaitu antara lain Partai Kebangkitan Bangsa dan Partai Amanat Nasional. Kedua partai yang terakhir ini massa pendukungnya terutama berasal dari para anggota dan simpatisan Ormas Islam Nahdatul Ulama dan Muahammadiyah, walaupun tidak seluruhnya anggota kedua organisasi tersebut menjadi anggota kedua partai itu.

Lahirnya partai berasaskan Islam dan partai yang berbasiskan massa Islam, sejak tahun 1998, yaitu setelah tumbanganya Orde Baru, adalah perkembangan yang menarik untuk dibicarakan. Paling tidak ada dua hal yang menjadi pertimbangan. Pertama, pada masa sebelumnya baik pada masa Orde Lama maupun pada masa Orde Baru, tidak ada gejala pembedaan yang demikian. Pada masa Orde Lama partai-partai Islam berasaskan Islam bersatu padu memperjuangkan idiologi Islam sebagai dasar negara. Pada masa Orde Baru yaitu yang dimulai pada pemilu tahun 1971 (pada saat itu ada 4 partai politik Islam yaitu Partai NU, PSII, PARMUSI dan PERTI), serta

Partai Persatuan Pembangunan untuk pemilu selanjutnya sampai dengan pemilu tahun 1997, tidak menunjukkan perbedaan yang demikian. Kedua, artikulasi politik partai Islam pada era reformasi ini, menunjukkan perbedaan yang cukup tajam, terutama tentang sifat partai dan perjuangan idiologi dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat. Partai yang berasaskan islam lebih tertutup, terutama dalam kepemimpinan partai dibanding dengan partai yang berbasis massa Islam. Walaupun kedua partai yang berbasis massa Islam mengklaim sebagai partai terbuka, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pemilih kedua partai tersebut adalah massa tradisional pendukung dan anggota ormas Muhammadiyah dan Nahdhatul Ulama.

Hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut adalah bagaimana partai-partai islam ini berperan dalam politik Indonesia, dan sejauh mana kemungkinannya untuk bisa memenangkan pemilu-pemilu berikutnya.

Partai Islam adalah partai yang secara eksplisit dan formal menyatakan diri sebagai partai Islam atau partai yang didasarkan atas asas Islam. Dalam hal ini, PPP, PBB, PK, PNU, PKU, PSII, Partai Masyumi, dan lain-lain, dapat dimasukkan ke dalam kategori ini. Tapi ke dalam partai Islam dapat pula dimasukkan partai-partai yang secara sosiologis berakar dalam organisasi sosial keagamaan Islam seperti NU dan Muhammadiyah walaupun partai-partai tersebut secara eksplisit menyatakan partai terbuka terhadap pemeluk agama-agama lain, dan secara formal tidak menyatakan diri sebagai partai Islam. Ke dalam kategori ini termasuk PKB dan PAN. PKB adalah partai yang didirikan oleh para elite NU di bawah kepemimpinan Abdurrahman Wahid yang dalam pemilu 1999 aktif sebagai juru kampanye partai ini. Dalam

hal ini, secara formal NU tidak menyatakan PKB sebagai partai NU, namun di bawah kepemimpinan Gus Dur, sebagian besar elite dan pengurus NU mendukung dan duduk dalam kepemimpinan PKB. Karena itu, secara sosiologis, bukan secara formal, tidak keliru bila PKB dianggap oleh banyak kalangan sebagai partai NU atau kaum Nahdliyin.

Sementara itu PAN didirikan oleh sejumlah aktivis dan intelektual dengan latar belakang keagamaan lebih beragam. Karena itu sejak awal partai ini mengklaim dirinya sebagai partai terbuka yang punya komitmen terhadap pluralisme keagamaan. Tapi kepemimpinan Amien Rais dan sejumlah figur di jajaran elite PAN membuat partai ini secara sosiologis cukup mudah diidentikkan dengan umat Islam yang berafiliasi dengan ormas Islam terbesar kedua, yakni Muhammadiyah. Karena itu cukup beralasan kalau partai ini secara sosiologis juga dimasukkan ke dalam kategori partai Islam.

Sebaliknya, banyak partai politik di Tanah Air yang tidak bisa diidentikkan dengan kelompok keagamaan tertentu, seperti Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (PDI-P), Partai Golkar, Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), dan lain-lain. Partai-partai ini berorientasi nasionalis lintas agama, dan masing-masing berasas Pancasila. Untuk kepentingan analisa partai-partai ini disebut sebagai partai non-Islam. Dilihat dari sosiologi elite partai-partai ini sangat pluralistik dilihat dari kategori Islam versus non-Islam.

Secara historis, PDI-P adalah pelanjut Partai Nasional Indonesia (PNI) yang hampir identik dengan figur Bung Karno. Sementara itu, Partai Golkar dan PKP adalah partai yang hadir dari elite Orde Baru, terutama kelompok militer

dan birokrasi, yang pada masa Orde Baru telah berhasil membebaskan partai-partai politik dari afiliasinya dengan kelompok keagamaan tertentu, setidaknya secara formal.

Dengan karakteristik keagamaan seperti di atas suatu hipotesis tentang pilihan atas partai politik dapat dinyatakan bahwa pemilih yang beragama Islam cenderung akan memilih partai-partai Islam (PPP, PBB, PK, PNU, PKU, PSII, Masyumi, PKB, dan PAN), sementara pemilih non-Islam cenderung akan memilih partai-partai non-Islam (PDI-P, Golkar, dan PKP). Dalam analisis ini dibatasi hanya pada partai-partai yang mendapat suara pada pemilu 1999, 2004, 2009 dan 2014 di Air Tiris. Diduga bahwa perbedaan agama (Islam versus non-Islam) di antara pemilih punya korelasi positif terhadap perbedaan memilih partai. Dengan kata lain, menjadi seorang Muslim cenderung memilih partai Islam, dan sebaliknya menjadi seorang non-Muslim cenderung memilih partai non-Islam, walaupun kecenderungan ini semakin melemah. Lemahnya kekuatan orientasi keagamaan terhadap pilihan partai politik di antara pemilih ditandai oleh kenyataan bahwa pemeluk agama non-Islam adalah minoritas, sementara pemilih yang beragama Islam mayoritas (lebih dari 50 persen) memilih partai non-Islam (PDI-P, Golkar, dan PKP).

Dalam konteks masyarakat Indonesia, argumen politik aliran yang dikembangkan Geertz (1962) sudah lama diyakini sebagai argumen yang valid untuk menjelaskan perilaku pemilih atau "*partisanship*" masyarakat Indonesia, atau lebih khusus lagi masyarakat Jawa. Dipercaya bahwa dukungan massa pemilih terhadap PNI dan PKI di satu pihak, dan terhadap Masyumi dan NU di pihak lain mencerminkan dua tipe keagamaan masyarakat Jawa:

abangan dan santri. Studi antropologis atas tipologi keagamaan ini didasarkan atas observasi langsung dan penafsiran si antropolog atas komunitas keagamaan tertentu dari suatu komunitas. Lewat pengamatan dan penafsiran tersebut si antropolog percaya bahwa ia bisa memahami tipe keagamaan yang berbeda tersebut dan hubungannya dengan dukungan atas partai politik tertentu.

Lepas dari kompleksitas tafsiran antropologis atas tipe keagamaan masyarakat Jawa yang disebut abangan dan santri tersebut, para antropolog sepakat untuk mendefinisikan "santri" sebagai Muslim yang taat atau berusaha menaati ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, sementara abangan adalah Muslim yang sebaliknya. Ia mempunyai kepercayaan dan praktik keagamaan tersendiri yang berakar dalam kepercayaan Hindu dan animisme. Seorang santri setidaknya memegang rukun Islam (membaca dua kalimat syahadat, menjalankan shalat lima waktu, membayar zakat bagi yang telah memenuhi syarat, menjalankan puasa di bulan Ramadhan, dan menunaikan ibadah haji bagi yang mampu).

Di antara lima rukun Islam ini, yang paling umum berlaku bagi umat Islam, relatif lepas dari status sosial dan ekonomi, adalah syahadat, shalat lima waktu, dan puasa pada bulan Ramadhan. Seorang santri adalah Muslim yang biasa atau setidaknya tidak jarang menjalankannya. Sementara abangan tidak atau jarang menjalankannya, dan digantikan dengan kepercayaan dan ritual abangan sendiri. Karena itu, frekuensi atau intensitas menjalankan shalat lima waktu dan puasa pada bulan Ramadhan merupakan ukuran minimal untuk membedakan seorang santri dan non-santri.

Di antara yang non-santri ini kita dapat membedakan antara varian abangan dan sekuler. Abangan punya kepercayaan terhadap kekuatan-kekuatan supranatural dari benda-benda, tempat-tempat, atau peristiwa-peristiwa tertentu di satu pihak, dan di pihak lain shalat lima waktu dan puasa di bulan Ramadhan tidak menjadi bagian dari ritual mereka. Mengukur abangan dapat dilihat dari sikap positif mereka terhadap dukun, benda-benda pusaka seperti keris, sesajen, dan ziarah ke kuburan keramat. Sementara itu varian sekuler bersikap negatif terhadap ritual abangan ini di satu pihak, dan di pihak lain tidak menjalankan ritual Islam seperti shalat lima waktu ataupun puasa di bulan Ramadhan. Tetapi pada tahun 80-an, sejumlah studi antropologi atas masyarakat Jawa mengklaim bahwa "santrinisasi" telah berlangsung di antara masyarakat Jawa sehingga apa yang disebut sebagai Islam abangan setidaknya tidak sebesar yang sering diklaim selama ini.

Kalau klaim Geertz benar, maka perubahan kultur-keagamaan dari abangan ke santri telah terjadi. Secara nasional bahwa sekitar 80 persen dari masyarakat Islam Indonesia biasa atau sering menjalankan shalat lima waktu dan puasa pada bulan Ramadhan. Selebihnya terbagi ke dalam dua kelompok: kelompok sekuler (sekitar 16 persen), dan kelompok abangan (sekitar empat persen). Dalam pemilihan umum 1999, ditemukan dampak variasi kultur-keagamaan ini terhadap pilihan partai, bahwa ada korelasi antara keduanya: santri berorientasi dengan partai Islam, dan non-santri dengan partai non-Islam. Tapi orientasi ini korelasinya lemah atau setidaknya tidak sebesar klaim politik aliran selama ini. Hal ini menunjukkan bahwa di satu

pihak, relatif besarnya proporsi santri di antara masyarakat Muslim di Indonesia, dan di pihak lain mayoritas dari mereka tidak mendukung partai-partai Islam.

Secara lebih khusus dapat ditegaskan bahwa mayoritas (63 persen) pemilih PDI-P adalah santri. Mayoritas pemilih partai-partai Islam yang santri tentu lebih besar lagi, rata-rata di atas 85 persen. Perbedaan ini secara statistik signifikan, tapi tidak sebesar yang diklaim selama ini bahwa PDI-P adalah partai massa abangan.

Di samping itu, mudarnya politik aliran di tingkat massa nampaknya tidak berkorelasi dengan perilaku politik elite. Politik aliran nampaknya masih berpengaruh di kalangan elite sehingga menjadi sumber politik yang dapat dimanipulasi elite ketika dihadapkan dengan persaingan di antara elite politik. Indikasinya dapat dilihat dalam Sidang Umum MPR 1999 yang lalu di mana kegagalan Megawati terpilih sebagai presiden sebagian ditentukan oleh sentimen aliran di antara anggota MPR. Sentimen "asal jangan Mega" nampaknya berpengaruh di sebagian besar anggota MPR. Elite cenderung tidak mempedulikan kecenderungan di tingkat massa pemilih yang tidak banyak mempedulikan aliran dari masing-masing partai politik, terbukti dengan relatif rendahnya perolehan suara partai-partai yang secara eksplisit menyatakan diri sebagai partai Islam, sementara mayoritas massa pemilih adalah santri. Massa pemilih santri nampaknya sudah cukup toleran; sudah cukup mampu membedakan wilayah politik dan wilayah keagamaan, dua wilayah yang sering dikaburkan oleh elite politik dalam memobilisasi dukungan massa. Dengan kata lain aliran ternyata tidak menjelaskan secara kuat kenapa seorang pemilih memilih partai tertentu.

Identifikasi diri dengan partai politik yang dikenal sebagai *Party Identification* merupakan variabel penting dalam studi-studi perilaku pemilih di negara-negara demokrasi mapan, terutama dalam tradisi studi perilaku pemilih Amerika. Di negeri ini, pemilih memilih calon presiden, calon anggota kongres, dan lain-lain didasarkan atas kesamaan identitas partai politik antara si pemilih dan si calon tersebut. Seorang yang mengaku demokrat sangat berkecenderungan memilih seorang calon dari Partai Demokrat karena keduanya disatukan oleh identitas partai yang sama, yakni Partai Demokrat, lepas dari perbedaan kelas, agama, etnik, ras, maupun isu atau program yang ditawarkan sang calon. Para pendukung *Party Identification* percaya bahwa *Party Identification* cukup independen untuk menjelaskan pilihan terhadap calon-calon tertentu dalam persaingan jabatan penting di pentas politik nasional maupun lokal.

Selain *Party Identification*, berkembang konsep yang relatif baru dalam studi perilaku pemilih, yakni kedekatan secara emosional terhadap pemimpin, tokoh, atau figur nasional dari partai politik tertentu, untuk menjelaskan kenapa seorang pemilih memilih partai politik tersebut. Tokoh-tokoh nasional yang relatif dikenal luas secara nasional adalah variabel yang relatif independen untuk menarik massa agar memilih partai di mana sang tokoh tersebut merupakan tokoh di partai tersebut. Orang memilih Golkar, PDI-P, PKB, PAN, PPP, PBB, dan lain-lain bukan karena daya tarik partai-partai itu sendiri, tapi lebih karena ada tokoh-tokoh nasional terlibat di pucuk kepemimpinan partai.

Keunggulan PDI-P atas partai-partai lain yang secara historis dan sosiologis mirip seperti PDI Budi

Hardjono, PNI Supeni, PNI Marhaen, dan lain-lain tidak lain karena ketokohan Megawati sebagai Putri Soekarno. Selain itu, ia merupakan tokoh yang sangat tidak diuntungkan sepanjang sejarah politik Orde Baru yang secara nasional mendapat ekspos cukup besar dari media massa. Kemenangan PAN relatif terhadap partai-partai Muslim modernis lain seperti PBB, PK, Partai Masyumi, sebagian besar dapat dijelaskan dengan kehadiran Amien Rais sebagai tokoh nasional di pucuk kepemimpinan partai tersebut.

Keunggulan pengumpulan suara oleh PKB dibanding partai-partai NU yang lain seperti PNU, PKU, dan Partai Suni, dan bahkan PPP sendiri, merupakan hasil dari ketokohan Gus Dur di partai tersebut, bukan karena faktor ke-NU-an itu sendiri. Sebab kalau ke-NU-an itu sendiri yang dominan, maka partai-partai NU yang lain juga akan mendapat suara yang cukup hingga PKB tidak keluar sebagai partai NU yang besarnya mencolok dibanding partai-partai NU yang lain.

Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa kekuatan partai politik akan banyak ditentukan sejauh mana partai-partai tersebut mampu melakukan rekrutmen terhadap tokoh-tokoh yang populer di mata massa pemilih. Kemampuan elite partai untuk membangun citra yang positif terhadap tokoh partai dan kemampuan untuk mensosialisasikan citra yang positif ini secara massif lewat media massa merupakan poin krusial bagi perkembangan dan kekuatan partai di masa yang akan datang. Dari sini partai politik akan semakin terlembaga, yang

pada gilirannya akan menjadi kekuatan yang relatif otonom untuk menarik masa pemilih³.

Dalam rentang waktu pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014 di Air Tiris terdapat partai-partai politik yang dikategorikan sebagai partai politik Islam dan partai politik non Islam. Partai politik Islam yang ada adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB), dan Partai Bintang Reformasi (PBR). Sementara partai politik non Islam terdiri dari Partai Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat (PD), Partai NasDem, Partai Gerindra, Partai Hanura, dan PKPI.

3.3. Orientasi Politik Masyarakat Air Tiris

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) didirikan tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil fusi politik empat partai Islam, yaitu Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), dan Partai Islam Perti. Fusi ini menjadi simbol kekuatan PPP, yaitu partai yang mampu mempersatukan berbagai faksi dan kelompok dalam Islam. Untuk itulah wajar jika PPP kini memproklamirkan diri sebagai “Rumah Besar Umat Islam.”

PPP didirikan oleh lima deklaratör yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan seorang ketua kelompok persatuan pembangunan, semacam fraksi empat partai Islam di DPR. Para deklaratör itu adalah; KH Idham Chalid, Ketua Umum PB Nadhlatul

³R William Liddle Guru besar di Ohio State University, AS Saiful Mujani Pengajar di PPIM-IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta

Ulama; H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi); Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII; Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti; dan Haji Mayskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di Fraksi DPR.

Ketua Umum DPP PPP yang pertama adalah H.Mohammad Syafaat Mintaredja, SH yang menjabat sejak tanggal 5 Januari 1973 sampai tahun 1978. Selain jabatan Ketua Umum pada awal berdirinya PPP juga mengenal presidium partai yang terdiri dari KH. Idham Chalid sebagai Presiden Partai, H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH, Drs.H.Th.M. Gobel, Haji Rusli Halil dan Haji Masykur, masing-masing sebagai Wakil Presiden.

Ketua Umum DPP PPP yang kedua adalah H. Jailani Naro, SH. Dia menjabat dua periode. Pertama tahun 1978 ketika H. Mohammad Syafaat Mintaredja mengundurkan diri sampai diselenggarakannya Muktamar I PPP tahun 1984. Dalam Muktamar I itu Naro terpilih lagi menjadi Ketua Umum DPP PPP. Ketua Umum DPP PPP yang ketiga adalah H. Ismail Hasan Metareum, SH, yang menjabat sejak terpilih dalam Muktamar II PPP tahun 1989 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar III tahun 1994.

Ketua Umum DPP PPP yang keempat adalah H. Hamzah Haz yang terpilih dalam Muktamar IV tahun 1998 dan kemudian terpilih kembali dalam Muktamar V tahun 2003. Hasil Muktamar V tahun 2003 juga menetapkan jabatan Wakil Ketua Umum Pimpinan Harian Pusat DPP PPP, yang dipercayakan muktamar kepada mantan Sekjen DPP PPP, H. Alimarwan Hanan,SH. Ketua Umum DPP PPP yang kelima adalah H. Suryadharma Ali yang terpilih dalam Muktamar VI tahun 2007 dengan Sekretaris

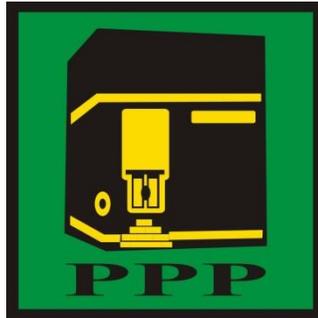
Jenderal H. Irgan Chairul Mahfiz sedangkan Wakil Ketua Umum dipercayakan oleh muktamar kepada Drs. HA. Chozin Chumaidy. H. Suryadharma Ali kemudian terpilih kembali menjadi Ketua Umum untuk Masa Bakti 2011-2015 melalui Muktamar VII PPP 2011 di Bandung. PPP sudah mengikuti sebanyak sembilan kali sejak tahun 1977 sampai pemilu tahun 2014 dengan hasil yang fluktuatif, turun naik.

PPP tidak boleh hanya terpaku pada “kader jenggot” yaitu kader yang hanya terpampang namanya sebagai pengurus PPP, namun dalam praktiknya tidak pernah memberikan sumbangsih kepada PPP. Lebih baik mencalonkan aktivis organisasi Islam sebagai pejabat publik yang telah memberikan sumbangsih kepada organisasi Islamnya daripada mencalonkman kader PPP tidak jelas modal sosial dan sumbangsihnya kepada Islam dan umat Islam. Al-Qur’an menyatakan: *khairun nas, anfa’uhum lin nas*. Kalau diterjemahkan dalam konteks pencalonan, sebaik-baiknya orang yang berhak dicalonkan sebagai pejabat publik oleh PPP adalah orang yang memberikan sumbangsih besar kepada umat Islam, baik melalui PPP atau melalui organisasi Islam lainnya.

Dengan modal sejarah itu seharusnya pengurus PPP di berbagai tingkatan dapat menghimpun dan merangkul seluruh potensi dan kekuatan umat Islam Indonesia dalam rangka menegakkan perjuangan para pahlawan yaitu menciptakan *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur* (Negara yang adil makmur)⁴.

⁴Partaiislam.blogspot.co.id/2014/03/sejarah-berdirinya-partai-persatuan.html

Gambar 3.1.
Lambang Partai Persatuan Pembangunan (PPP)



Sumber : Partaiislam.blogspot.co.id/2014/03/sejarah-berdirinya-partai-persatuan.html

Partai Amanat Nasional (PAN) adalah partai yang kelahirannya dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu organ gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto, PPSK Muhammadiyah, dan Kelompok Tebet. PAN dideklarasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya mantan Ketua Umum Muhammadiyah Prof. Dr. H. Amien Rais, Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Faisal Basri, M.A., A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao, dan lainnya. Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5–6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa (PAB) yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN).

PAN bertujuan menjunjung tinggi dan menegakkan kedaulatan rakyat, keadilan, kemajuan material, dan spiritual. Cita-cita partai berakar pada moral agama,

kemanusiaan, dan kemajemukan. Selibuhnya PAN menganut prinsip non-sektarian dan non-diskriminatif. Untuk terwujudnya Indonesia Baru, PAN pernah melontarkan gagasan wacana dialog bentuk negara federasi sebagai jawaban atas ancaman disintegrasi. Titik sentral dialog adalah keadilan dalam mengelola sumber daya sehingga rakyat seluruh Indonesia dapat benar-benar merasakan sebagai warga bangsa⁵.

Gambar 3.2.
Lambang Partai Amanat Nasional (PAN)



Sumber :
https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional

⁵https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Amanat_Nasional

Asal-usul Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dapat ditelusuri dari gerakan dakwah kampus yang menyebar di universitas-universitas di Indonesia pada tahun 1980-an. Gerakan ini dapat dikatakan dipelopori oleh Muhammad Natsir, mantan Perdana Menteri Indonesia dari Masyumi (dibubarkan pada 1960) yang mendirikan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) pada 1967. Lembaga ini awalnya fokus kepada usaha mencegah kegiatan misionari Kristen di Indonesia. Peran DDII yang paling krusial adalah kelahiran Lembaga Mujahid Dakwah yang berafiliasi dengan DDII, dipimpin Imaduddin Abdulrahim yang aktif melakukan pelatihan keagamaan di Masjid Salman, Institut Teknologi Bandung.

Pada 1985, rezim Orde Baru mewajibkan seluruh organisasi massa menjadikan Pancasila sebagai dasarnya. Ini membuat sejumlah tokoh Islamis berang dan menyebut rezim Soeharto telah memperlakukan politik Islam sebagai *kutjing kurap*. Pada saat yang sama, Jamaah Tarbiyah meraih momentumnya di kalangan mahasiswa kader Rohis dan aktivis dakwah di kampus-kampus. Pada tahun 1993, Mustafa Kamal, seorang kader Jamaah Tarbiyah, memenangi pemilihan mahasiswa untuk Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, kader Jamaah pertama yang memegang kekuasaan di level universitas. Setahun kemudian, Zulkieflimansyah, juga kader Jamaah Tarbiyah, menjadi Ketua Senat Mahasiswa di universitas yang sama.

Para anggota Jamaah Tarbiyah kemudian mendirikan Lembaga Dakwah Kampus, yang kemudian menjadi unit-unit kegiatan mahasiswa yang resmi di berbagai kampus sekuler di Indonesia, seperti di Universitas Indonesia, terutama oleh para aktivis Forum

Studi Islam. Saat itu, kata *usrah* yang sering dipakai untuk menyebut kelompok-kelompok kecil pengajian di LDK mulai diasosiasikan, dengan menggunakan sistem sel ala Ikhwanul Muslimin untuk merekrut kader. Meskipun adanya berbagai faksi dan kubu di dalam tubuh LDK, semuanya sepakat membentuk Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) pada 1986. Pertemuan tahunan ke-10 FSLDK di Malang pada 1998 dimanfaatkan untuk deklarasi Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

KAMMI muncul sebagai salah satu organisasi yang paling vokal menyuarakan tuntutan reformasi melawan Soeharto, dipimpin oleh Fahri Hamzah. Sejurus setelah mundurnya Soeharto pada 21 Mei 1998, para tokoh KAMMI telah mempertimbangkan berdirinya sebuah partai Islam. Partai tersebut kemudian diberi nama Partai Keadilan (disingkat PK). Kendati tokoh elit KAMMI memiliki kontribusi dalam pembentukan PK, KAMMI dan PK secara tegas menyatakan bahwa tidak memiliki hubungan formal.

Partai Keadilan dideklarasikan di Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta, pada 20 Juli 1998, dan mengangkat Nurmahmudi Isma'il sebagai presiden pertamanya. Di pemilihan umum legislatif Indonesia 1999, PK mendapat 1,436,565 suara, sekitar 1,36% dari total perolehan suara nasional dan mendapat tujuh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat. Meskipun demikian, PK gagal memenuhi ambang batas parlemen sebesar dua persen, sehingga memaksa partai ini melakukan *stembus accord* dengan delapan partai politik berbasis Islam lainnya pada Mei 1999.

Nurmahmudi kemudian, ditawarkan jabatan Menteri Kehutanan di Kabinet Persatuan Nasional bentukan presiden Abdurrahman Wahid pada Oktober 1999. Ia menyetujui tawaran tersebut dan menyerahkan jabatan presiden partai kepada Hidayat Nur Wahid, seorang doktor lulusan Universitas Islam Madinah, sejak 21 Mei 2000. Karena kegagalan PK memenuhi ambang batas parlemen di pemilihan umum selanjutnya, menurut regulasi pemerintah, mereka harus mengganti nama. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Hukum dan HAM di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat provinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat kabupaten dan kota). Sehari kemudian, PK resmi berubah nama menjadi Partai Keadilan Sejahtera.

Dengan bergantinya PK menjadi PKS, partai ini kembali bertanding di pemilihan umum legislatif Indonesia 2004. PKS meraih total 8,325,020 suara, sekitar 7.34% dari total perolehan suara nasional. PKS berhak mendudukkan 45 wakilnya di DPR dan menduduki peringkat keenam partai dengan suara terbanyak, setelah Partai Demokrat. Presiden partai, Hidayat Nur Wahid, terpilih sebagai ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan 326 suara, mengalahkan Sutjipto dari PDIP dengan 324 suara. Hidayat menyerahkan jabatan presiden kepada Tifatul Sembiring, juga seorang mantan aktivis kampus dan pendiri PKS⁶.

⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera

Gambar 3.3.
Lambang Partai Keadilan Sejahtera (PKS)



Sumber:

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Keadilan_Sejahtera

Partai Bintang Reformasi (PBR) adalah salah satu partai politik di Indonesia. Dalam Pemilu 2009, partai ini bernomor urut 29. Partai Bintang Reformasi merupakan nama baru dari Partai Persatuan Pembangunan Reformasi (PPP Reformasi) yang dideklarasikan pada tanggal 20 Januari 2002, sebagai hasil penggabungan dari Partai Indonesia Baru, Partai Ummat Muslimin Indonesia, Partai Kebangkitan Muslim Indonesia, dan Partai Republik.

Selain itu PBR juga didukung oleh puluhan LSM, ormas, para Ulama dan Cendekiawan, pedagang, mahasiswa, buruh dan petani. PBR mempunyai tujuan untuk memperbaiki kepemimpinan nasional, pemerataan ekonomi dan penegakan hukum yang selaras dengan cita-cita partai untuk mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera lahir dan batin, adil, mandiri dan demokratis yang

diridhoi Allah SWT. Pada Pemilu 2004, partai ini sempat berniat mengajukan Ketua Umumnya, KH Zainuddin MZ yang dikenal dengan sebutan Da'i Sejuta Ummat, sebagai calon presiden⁷.

Partai Bintang Reformasi (PBR) muncul dari buah pertikaian internal Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Setelah sekian lama mengusung nama PPP Reformasi, pada 20 Januari 2002 berganti nama menjadi PBR. Walau sudah berdiri sendiri, masalah tak langsung lepas dari PBR. Dalam tubuh partai ini juga sempat muncul konflik kepemimpinan antara Bursah Zarnubi dengan Zaenal Maarif yang akhirnya berakhir dengan menyeberangnya Maarif ke Partai Demokrat. Menghadapi Pemilu 2009, PBR membuat langkah yang cukup mengejutkan. PBR merangkul beberapa aktivis gerakan radikal seperti Dita Indah Sari, Yusuf Lakaseng, untuk duduk sebagai caleg bagi PBR.

Visi PBR adalah partai gerakan yang terbuka bagi semua golongan, sebagai alat perjuangan dalam rangka menjaga keutuhan NKRI, memperbaiki kualitas hidup rakyat Indonesia, dan menuntaskan agenda reformasi bangsa Indonesia. Sedangkan misi PBR adalah mewujudkan masyarakat madani Indonesia yang sejahtera, adil, mandiri, dan demokratis yang diridhoi Allah SWT dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945⁸.

⁷https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Bintang_Reformasi

⁸[News.detik.com/parpol/1059605/partai-bintang-reformasi--29-](https://news.detik.com/parpol/1059605/partai-bintang-reformasi--29-)

Gambar 3.4.
Lambang Partai Bintang Reformasi (PBR)



Sumber : [News.detik.com/parpol/1059605/partai-bintang-reformasi--29-](https://news.detik.com/parpol/1059605/partai-bintang-reformasi--29-)

Partai Golongan Karya (Partai Golkar), sebelumnya bernama Golongan Karya (Golkar) dan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), adalah sebuah partai politik di Indonesia. Partai Golkar bermula dengan berdirinya Sekber Golkar pada masa-masa akhir pemerintahan Presiden Soekarno, tepatnya 1964 oleh Angkatan Darat untuk menandingi pengaruh Partai Komunis Indonesia dalam kehidupan politik. Dalam perkembangannya, Sekber Golkar berubah wujud menjadi Golongan Karya yang menjadi salah satu organisasi peserta Pemilu.

Dalam Pemilu 1971 (Pemilu pertama dalam pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto), salah satu pesertanya adalah Golongan Karya dan tampil sebagai pemenang. Kemenangan ini diulangi pada Pemilu-pemilu

pemerintahan Orde Baru lainnya, yaitu Pemilu 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997. Kejadian ini dapat dimungkinkan, karena pemerintahan Soeharto membuat kebijakan-kebijakan yang sangat mendukung kemenangan Golkar, seperti peraturan monoloyalitas PNS, dan sebagainya.

Setelah pemerintahan Soeharto selesai dan reformasi bergulir, Golkar berubah wujud menjadi Partai Golkar, dan untuk pertama kalinya mengikuti Pemilu tanpa ada bantuan kebijakan-kebijakan yang berarti seperti sebelumnya pada masa pemerintahan Soeharto. Pada pemilu 1999 yang diselenggarakan Presiden Habibie, perolehan suara Partai Golkar turun menjadi peringkat kedua setelah PDI-P.

Ketidakpuasan terhadap pemerintahan Megawati Sukarnoputri menjadi salah satu sebab para pemilih di pemilu legislatif 2004 untuk kembali memilih Partai Golkar, selain partai-partai lainnya seperti Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan lain-lain. Partai Golkar menjadi pemenang Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif pada tahun 2004 dengan meraih 24.480.757 suara atau 21,58% dari keseluruhan suara sah.

Kemenangan tersebut merupakan prestasi tersendiri bagi Partai Golkar karena pada Pemilu Legislatif 1999, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan mendominasi perolehan suara. Dalam Pemilu 1999, Partai Golkar menduduki peringkat kedua dengan perolehan 23.741.758 suara atau 22,44% dari suara sah. Partai Golkar mendapat peningkatan 738.999 suara, tapi dari prosentase turun sebanyak 0,86%⁹.

⁹https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golongan_Karya

Gambar 3.5.
Lambang Partai Golongan Karya (Partai Golkar)



Sumber :

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Golongan_Karya

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) adalah sebuah partai politik di Indonesia. Lahirnya PDI-P dapat dikaitkan dengan peristiwa 27 Juli 1996. Dampak politik dari peristiwa ini adalah tampilnya Megawati Soekarnoputri di kancah perpolitikan nasional. Walaupun sebelum peristiwa ini Megawati tercatat sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia dan anggota Komisi I DPR, namun setelah peristiwa inilah, namanya dikenal di seluruh Indonesia.

Setelah dibukanya keran demokrasi pada masa pemerintahan Presiden Habibie, untuk menyongsong Pemilu 1999, PDI-P didirikan. Dalam Pemilu ini, PDI-P menduduki peringkat pertama untuk suara DPR dengan memperoleh 151 kursi. Walaupun demikian, PDI-P gagal mengusung Megawati ke kursi kepresidenan, karena kalah *voting* dalam Sidang

Umum MPR 1999 dari Abdurrahman Wahid, dan oleh karenanya Megawati menduduki kursi wakil presiden. Setelah Abdurrahman Wahid turun dari jabatan presiden pada tahun 2001, PDI-P berhasil menempatkan Megawati ke kursi presiden.

Dalam Pemilu Legislatif 2004, perolehan suara PDI-P turun ke peringkat kedua, dengan 109 kursi. Untuk Pemilu Presiden 2004, PDI-P kembali mencalonkan Megawati sebagai calon presiden, berpasangan dengan KH Hasyim Muzadi sebagai calon wakil presiden. Pada Pemilu Legislatif 2009, perolehan suara PDI-P kembali turun ke peringkat ke-tiga dengan jumlah kursi sebanyak 94 kursi. PDI-P kemudian bersama dengan Partai Gerindra mengusung pasangan Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada Pemilu Presiden 2009.

Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 kali ini, PDI-P berhasil meraih peringkat pertama dan mendapatkan perolehan suara sebanyak 18.95% dan perolehan kursi DPR sebanyak 109 kursi. PDI-P bersama dengan Partai NasDem, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Hanura, dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia dalam Pemilihan Presiden 2014 kali ini mengusung Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dan mantan Wakil Presiden M. Jusuf Kalla sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Kongres I PDI-P berlangsung di Semarang, Jawa Tengah pada tahun 2000.

Pada 28 Maret 2005, Kongres II PDI-P dibuka di Sanur, Bali, di tengah aksi sekelompok kader yang meminta reformasi di dalam tubuh PDI-P dan terkumpul dalam "Gerakan Pembaruan PDI-P". Kongres ditutup

pada 31 Maret, dua hari lebih cepat dari yang direncanakan, dengan terpilihnya kembali Megawati Soekarnoputri secara aklamasi oleh sekitar 1.000 utusan PDI Perjuangan dari seluruh Indonesia sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan periode 2005-2010 beserta sejumlah pengurus lainnya. Sadar akan tuntutan proses regenerasi kepemimpinan dalam tubuh partai, Megawati menunjuk Pramono Anung Wibowo, seorang politisi muda, sebagai Sekretaris Jenderal. Sedangkan Guruh Sukarnoputra, adik Megawati, yang sebelumnya ikut dalam bursa calon Ketua Umum, terpilih sebagai Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan¹⁰.

Gambar 3.6.
Lambang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)



PDI PERJUANGAN

Sumber :

https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan

¹⁰https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrasi_Indonesia_Perjuangan

Partai Demokrat adalah sebuah partai politik Indonesia. Partai ini didirikan pada 9 September 2001 dan disahkan pada 27 Agustus 2003. Pendirian partai ini erat kaitannya dengan niat untuk membawa Susilo Bambang Yudhoyono, yang kala itu menjadi Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan di bawah Presiden Megawati, menjadi presiden. Karena hal inilah, Partai Demokrat terkait kuat dengan figur Yudhoyono.

Pada Kongres IV Partai Demokrat yang diadakan di Hotel Shangri-La, Surabaya, 12 Mei 2015, Susilo Bambang Yudhoyono kembali terpilih menjadi Ketua Umum untuk periode 2015-2020.

Partai ini pertama kali mengikuti pemilihan umum pada tahun 2004 dan meraih suara sebanyak 7,45% (8.455.225) dari total suara dan mendapatkan kursi sebanyak 57 kursi di DPR. Dengan perolehan tersebut, Partai Demokrat meraih peringkat ke 5 Pemilu Legislatif 2004. Menjelang Pemilu 2004, popularitas partai ini cukup terdongkrak dengan naiknya popularitas Yudhoyono waktu itu. Bersama PKS, partai ini menjadi *the rising star* pada pemilu kedua di Era Reformasi itu. Popularitas partai ini terutama berada di kota-kota besar, dan di wilayah bekas Karesidenan Madiun, tempat Yudhoyono berasal.

Dari hasil Pemilu 2009, Partai Demokrat menjadi Pemenang Pemilu Legislatif 2009. Partai Demokrat memperoleh 150 kursi (26,4%) di DPR RI, setelah mendapat 21.703.137 total suara (20,4%). Partai Demokrat meraih suara terbanyak di banyak provinsi, hal yang pada pemilu sebelumnya tidak terjadi, seperti di Aceh, DKI Jakarta, dan Jawa Barat.

Pada Pemilu 2014, jumlah perolehan suara dan perolehan kursi di DPR untuk Partai Demokrat merosot drastis dari posisi pertama pada 2009, menjadi posisi keempat dari 10 partai di DPR, dengan perolehan suara sebanyak 10,19% suara nasional (12.728.913). Perolehan itu disebut-sebut karena kasus beberapa kader partai yang terkait masalah hukum yang membuat citra Partai Demokrat menurun di mata publik.

Pada Kongres Luar Biasa Partai Demokrat yang diadakan di Bali tanggal 30 Maret 2013, Susilo Bambang Yudhoyono ditetapkan sebagai ketua umum Partai Demokrat, menggantikan Anas Urbaningrum. Susilo Bambang Yudhoyono juga memilih Syarif Hasan sebagai Ketua Harian DPP Demokrat. Syarif Hasan di Kabinet Indonesia Bersatu II juga menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM. Sementara, Marzuki Alie ditunjuk sebagai Wakil Ketua Majelis Tinggi yang sebelumnya dijabat Anas Urbaningrum. Adapun Ketua Harian Dewan Pembina dijabat oleh E.E. Mangindaan (Menteri Perhubungan).

Masalah kontroversi kader mengemuka setelah Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin dijadikan tersangka korupsi pembangunan wisma Atlet di Palembang. M. Nazaruddin bahkan sempat diburu interpol, kepolisian, dan KPK untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menerima *fee* suap dari proyek SEA Games 2011 yang akhirnya menghasilkan banyak keterangan yang melibatkan beberapa anggota partai. Tak ayal, Andi Malarangeng pun mengundurkan diri sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga pada 7 Desember 2012 karena ditetapkan sebagai tersangka kasus

Hambalang, sementara Anas Urbaningrum mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat setelah menandatangani pakta integritas pada 14 Februari 2013 yang menyatakan siap mundur jika ditetapkan sebagai tersangka korupsi yang kemudian diikuti penetapan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 22 Februari 2013 atas kasus gratifikasi mobil. Pada tanggal 23 Februari 2013 Anas mundur sebagai ketua umum Partai Demokrat sehingga menimbulkan kekosongan kursi ketua umum. Namun, ia menjelaskan bahwa tanpa pakta integritas pun, ia punya kesadaran untuk mundur. Angelina Sondakh juga ikut terseret sebagai tersangka sejumlah kasus korupsi¹¹.

Gambar 3.7.
Lambang Partai Demokrat



Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat

¹¹https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Demokrat

Partai Gerakan Indonesia Raya atau Partai Gerindra, adalah sebuah partai politik di Indonesia yang didirikan dan diketuai oleh Letnan Jenderal TNI (Purn) H. Prabowo Subianto. Partai Gerindra berdiri pada tanggal 6 Februari 2008. Pengurus dan aktivis partai ini dicirikan dengan pakaian safari lengan pendek dan panjang, serta kopiah hitam. Inspirasi nama Gerindra berasal dari nama partai lama, Perindra, yang merupakan pemberian langsung dari Presiden Soekarno.

Pada periode 2009-2014 Partai Gerindra berada di luar kabinet bersama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Hanura. Pada pemilihan umum 2014 partai Gerindra mendapatkan 73 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Partai Gerindra mengusung Prabowo Subianto selaku Ketua Dewan Pembina sebagai calon presiden. Pada periode 2014-2019, Partai Gerindra kembali berada di luar kabinet bersama partai-partai politik dalam Koalisi Merah Putih.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai GERINDRA (2015 - 2020) dipimpin oleh H. Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina; Fadli Zon, S.S., M.Sc. sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Politik Dalam Negeri dan Pemerintahan; Mayjen TNI (Purn.) Yogi Magyo Yusuf sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Luar Negeri; Mayjen TNI (Purn.) Chaerawan Musyirawan, sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Keamanan; Dr. Sumarjati Arjoso, sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan SDM; Arief Puyuno, SE sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Buruh dan Ketenagakerjaan; Murphy Hutagalung, MBA sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi Keuangan dan Industri; Edhy Prabowo, MM, MBA, sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pembangunan

Pertanian Kehutanan dan Energi; Dr. Marwah Daud Ibrahim, sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Koperasi UMKM dan Ekonomi Kreatif; Widjono Hardjanto, sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi dan Keanggotaan; Ferry Joko Yuliantono, sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Penggalangan Massa; Rachmawati Soekarnoputri, sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Ideologi; Sugiono, sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Kaderisasi dan Informasi; Sufmi Dakso Ahmad, sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan Advokasi; Purnowo, sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Pemuda dan Olahraga; Ahmad Muzani, sebagai Sekretaris Jenderal; T.A. Muliatna Djiwandono, sebagai Bendahara Umum.

Berdasarkan dokumen Manifesto Partai Gerindra, jati diri Partai Gerindra adalah pertama, Kebangsaan, Partai Gerindra adalah partai yang berwawasan kebangsaan yang berpegang teguh pada karakter nasionalisme yang kuat, tangguh, dan mandiri. Wawasan kebangsaan ini menjadi jiwa dalam mewujudkan segala aspek kehidupan bernegara yang sejahtera, jaya dan sentosa . Kedua, Kerakyatan, Partai Gerindra adalah partai yang dibentuk dari, oleh, dan untuk rakyat sebagai pemilik kedaulatan yang sah atas Republik Indonesia. Keberpihakan pada kepentingan rakyat merupakan sebuah keniscayaan dalam arti semua pihak yakin untuk mewujudkan secara optimal hak-hak seluruh rakyat dalam segala aspek kehidupannya, utamanya di bidang kehidupan politiknya terlebih lagi dalam kehidupan dan kegiatan ekonominya.

Ketiga, Religius, Partai Gerindra adalah partai yang memegang teguh nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kebebasan menjalankan agama dan kepercayaan

masing- masing. Nilai-nilai religius senantiasa menjadi landasan bagi setiap jajaran pengurus, anggota, dan kader Partai Gerindra dalam bersikap dan bertindak. Keempat, Keadilan Sosial, Partai Gerindra adalah partai yang mencita-citakan suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan sosial, yakni masyarakat yang adil secara ekonomi, politik, hukum, pendidikan, dan kesetaraan gender. Keadilan sosial harus didasari atas persamaan hak, pemerataan, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia.

Setiap kader Partai Gerindra mengucapkan ikrar untuk siap sedia melanjutkan perjuangan pendiri bangsa, mewujudkan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 17 Agustus 1945. Ikrar tersebut; pertama, siap sedia membela Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945; kedua, siap sedia membela kepentingan rakyat Indonesia, di atas kepentingan pribadi maupun golongan; ketiga, Senantiasa setia kepada cita cita luhur partai; keempat, tunduk dan patuh kepada ideologi dan disiplin partai, serta menjaga kehormatan, martabat, dan kekompakan partai

Beberapa pandangan partai Gerindra di Parlemen di antaranya, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani bersama Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon saat *press conference* penolakan Partai Gerindra akan rencana pembangunan gedung baru DPR pada awal tahun 2011. Penolakan pembangunan gedung baru, pelarangan studi banding ke luar negeri dan inisiatif untuk membentuk panja mafia anggaran adalah beberapa gerakan Partai Gerindra di gedung parlemen.

Partai Gerindra menempati 26 kursi (4.64%) di DPR RI hasil Pemilihan Umum Anggota DPR 2009, setelah meraih 4.646.406 suara (4,5%). Sementara, pencapaian Pemilu Legislatif 2014, partai Gerindra berhasil menjadi partai politik ketiga terbesar di Indonesia dan menempati 73 kursi di DPR RI setelah meraih 14.760.371 suara (11,81%).

Selama kurun waktu 2012 hingga 2013, Gerindra secara mengejutkan mampu meloloskan dua anggotanya sebagai kepala daerah populer, yaitu Basuki Tjahaja Purnama sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta dan Ridwan Kamil sebagai Walikota Bandung. Keduanya diberi kebebasan besar untuk menjalankan tugasnya. Basuki Tjahaja Purnama dengan tegas menolak menjadi alat politik Gerindra karena telah diberitahu bahwa ia diwakafkan bagi Jakarta.^[3] Namun ia sempat hadir di kampanye Gelora Bung Karno¹².

Gambar 3.8.
Lambang Partai Gerindra



Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Gerindra

¹²https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_Gerindra

Partai NasDem adalah sebuah partai politik di Indonesia yang baru diresmikan di Hotel Mercure Ancol, Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2011. Partai ini didukung oleh Surya Paloh yang merupakan pendiri organisasi bernama sama yaitu Nasional Demokrat. Pada Januari 2013, KPU menetapkan 10 partai politik yang lolos tahapan verifikasi administrasi dan faktual, dan menjadikan Partai NasDem sebagai satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Pada bulan yang sama, partai ini diramaikan oleh isu terjadinya konflik di tataran para elit partai. Ketua Majelis Tinggi Partai Nasional Demokrat, Surya Paloh, kabarnya akan dicalonkan sebagai Ketua Umum Partai NasDem pada Kongres Partai NasDem yang akan diadakan pada 25 Januari 2013 di Jakarta. Pada bulan tersebut juga terjadi aksi pemecatan terhadap Sekjen DPW DKI Garda Pemuda Nasdem, Saiful Haq, sekaligus pembekuan kepengurusan DPW tersebut. Pada kongres perdana partai ini, yang diadakan pada Januari 2013, seluruh peserta kongres Partai NasDem yang berasal dari seluruh Indonesia secara aklamasi sepakat mengangkat Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai NasDem yang baru, menggantikan Patrice Rio Capella.

Kongres I Partai NasDem yang digelar pada 25-26 Januari 2013 di Jakarta menjadi tonggak sejarah perjalanan Partai NasDem. Berbagai keputusan penting dikeluarkan dalam kongres ini. Satu di antaranya ialah memilih dan menetapkan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem periode 2013-2018. Ibarat perahu, layar telah terkembang, lengkap dengan nakhoda dan awak kapal. Keputusan tersebut diambil pada sidang pleno pertama tanggal 25 Januari 2013 sekitar pukul 23.00 WIB. Seluruh

33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 497 Dewan Pimpinan Daerah (DPD), dan empat organisasi sayap (Gerakan Massa Buruh, Liga Mahasiswa, Badan Avokasi Hukum, dan Petani NasDem), bersatu suara memercayakan Surya Paloh menjadi nakhoda Partai NasDem selama lima tahun.

Kongres juga memberi mandat penuh kepada Surya Paloh untuk menyusun kepengurusan dan perangkat partai. Amanah kongres ini harus selesai selambat-lambatnya 14 hari sejak Surya Paloh terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum. Selain itu, Kongres juga memberi mandat penuh kepada Dewan Pimpinan Pusat di bawah kepemimpinan Surya Paloh untuk menetapkan strategi dan kebijakan guna memenangi Pemilihan Umum Legislatif 2014.

Kongres memberikan mandat penting itu kepada Surya Paloh berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum 2014 yang sudah di depan mata. Oleh sebab itu, Kongres memandang, rekrutmen calon anggota legislatif (caleg) merupakan bagian penting dan strategis dalam upaya memenangi pemilihan umum 2014. Kongres I Partai NasDem saat itu diikuti 66 orang yang mewakili 33 DPW, 994 orang mewakili 497 DPD, 9 orang mewakili Majelis Tinggi, dan 2 orang anggota Dewan Pakar. Selain peserta yang memiliki hak suara, Kongres juga dihadiri 800 orang peninjau yang datang dari seluruh penjuru Indonesia.

Dalam pidatonya setelah terpilih menjadi ketua umum, Surya Paloh antara lain menjelaskan, jabatan ketua umum bukanlah kredit poin. Pasalnya, Surya Paloh-lah yang mendirikan Partai NasDem dan sempat menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai NasDem, sejak partai ini didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM. Sebelum Surya Paloh terpilih secara resmi menjadi ketua umum

Partai NasDem, Patrice Rio Capella yang dipercaya sebagai ketua umum.

Kongres I Partai NasDem 25-26 Januari 2013 disebut Surya Paloh sebagai tonggak sejarah partai ini dalam melakukan gerak dan langkah ke depan untuk melakukan perubahan melalui gerakan Restorasi Indonesia. Partai ini, demikian Surya Paloh, harus mampu memberi catatan dengan tinta emas dalam lembaran perjalanan partai-partai politik di Indonesia. Meskipun baru, Partai NasDem telah membuat prestasi yang luar biasa. Prestasi luar biasa yang dimaksudkan Surya Paloh adalah partai ini telah memiliki visi dan misi yang konkrit (Restorasi Indonesia), sementara itu orang-orang yang ada di dalamnya memiliki kemampuan yang luar biasa, baik prestasi, maupun militansinya dalam melakukan gerakan perubahan. Surya Paloh lalu menunjuk Rio Capella yang berhasil memimpin partai hingga menggelar kongres partai yang pertama pada 25-26 Januari 2013.

Partai NasDem sendiri dideklarasikan kelahirannya pada tanggal 26 Juli 2011 di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta. Deklarasi Partai NasDem hanyalah salah satu tahapan dari satu rangkaian proses panjang perjalanan partai ini. Guna mendapatkan status resmi sebagai badan hukum, Partai NasDem didaftarkan ke Kementerian Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia pada bulan Maret 2011. Kelahiran Partai NasDem tidak bisa dipisahkan lepas dari visi dan misi utama organisasi kemasyarakatan (ormas) Nasional Demokrat, yaitu menggalang Gerakan Perubahan Restorasi Indonesia.

Setelah resmi menjadi partai, NasDem terus berupaya memenuhi persyaratan sebagaimana telah diatur dalam undang-undang untuk menjadi partai peserta pemilu.

Bersama dengan 46 parpol yang mengajukan diri ikut Pemilu 2014, Partai NasDem mengajukan berkas administrasi kepartaian ke Komisi Pemilihan Umum (KPU). Pada verifikasi awal terdapat 34 parpol yang lolos dari total 46 parpol yang mendaftar sebagai peserta Pemilu 2014 di KPU. Satu di antaranya yang lolos verifikasi administrasi adalah Partai NasDem.

Setelah melakukan verifikasi administrasi atas 34 parpol yang berniat ikut Pemilu 2014, KPU pada hari Minggu 28 Oktober 2012 malam, akhirnya mengumumkan hasil verifikasi administrasi. KPU menyatakan ada 16 partai yang lolos maju ke tahap verifikasi faktual dan 18 partai gugur. Ketua KPU Husni Kamil Manik menyatakan satu-satunya partai baru yang lolos tahap verifikasi administrasi adalah Partai NasDem. Bagi Partai NasDem seperti diungkapkan Ketua Umum NasDem, ketika itu, Patrice Rio Capella, apa yang diumumkan KPU bukan suatu kejutan. Partai NasDem nampak sudah siap bersaing dengan partai di parlemen dalam Pemilu 2014.

Dari 16 parpol yang dinyatakan lolos verifikasi administrasi, KPU menilai Partai NasDem lolos verifikasi administrasi dengan kualifikasi terbaik. Parpol yang lolos verifikasi administrasi, berhak mengikuti verifikasi faktual. Verifikasi faktual adalah tahap verifikasi langsung KPU ke lapangan untuk mengecek infrastruktur parpol di setiap daerah disesuaikan dengan hasil verifikasi administrasi.

Hari Senin 7 Januari 2013 merupakan hari yang mendebarkan bagi Partai NasDem. Pada hari itu KPU mengumumkan hasil verifikasi faktual dan menyatakan Partai NasDem lolos dalam memenuhi persyaratan verifikasi faktual tingkat pusat sebagaimana diatur dalam

UU Pemilu Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Partai NasDem memenuhi semua syarat verifikasi faktual di seluruh provinsi, dengan bukti-bukti, antara lain: memiliki kepengurusan seperti Ketua, Bendahara, dan Sekretaris Jenderal, memiliki lebih dari 30% anggota perempuan, dan memiliki kantor yang digunakan sampai akhir Pemilu 2014. Partai NasDem adalah satu-satunya partai baru yang lolos sebagai peserta Pemilu 2014. Itu berarti Partai NasDem berhak mengikuti pemilu untuk pertama kalinya pada 2014. Keputusan KPU meloloskan Partai NasDem merupakan hasil dari rapat pleno terbuka yang digelar di Gedung KPU Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Senin 7 Januari 2013. Rapat pleno dihadiri Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), perwakilan KPU tingkat provinsi se-Indonesia, dan pemantau Pemilu.¹³

Gambar 3.9.
Lambang Partai NasDem



Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_NasDem

¹³https://id.wikipedia.org/wiki/Partai_NasDem

Dinamika masyarakat politik pada masyarakat pedesaan menjadi penelitian yang menarik, sebagai salah satu yang utama dalam perwujudan hak politik masyarakat, termasuk masyarakat pedesaan. Dinamika masyarakat politik pedesaan merupakan gerak kehidupan masyarakat politik secara terus-menerus yang menimbulkan perubahan dalam tata kehidupan masyarakat politik tersebut pada masyarakat pedesaan.

Pelaksanaan hak politik yang lebih leluasa telah terjadi, sejak awal tahun 1998, di mana masyarakat terlepas dari kondisi politik yang terpusat. Keadaan ini menandai diperolehnya hak politik yang lebih bebas. Dalam kondisi demikian kehidupan masyarakat politik memiliki keleluasaan. Masyarakat politik di Air Tiris merupakan masyarakat santri yang seolah memperoleh nuansa baru yang membuat optimisme akan diperolehnya kebebasan untuk menentukan pilihan dalam pemilihan umum.

Pada negara dengan sistem politik demokratik, perilaku politik warga negara di antaranya dalam bentuk partisipasinya dalam pemilihan umum, yaitu kegiatan memberikan suara kepada calon-calon yang diajukan oleh partai-partai politik, yang diajukan secara periodik untuk mengisi jabatan-jabatan politik pada pemerintahan. Dalam hal ini Powel¹⁴ mengemukakan sebagai berikut: "*participation by citizens in competitive elections is distinctive feature of democratic politics*".

Indonesia sebagai negara demokrasi, pemilihan umum pada masa pemerintahan reformasi, dilaksanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat, yaitu anggota-anggota

¹⁴G. Bingham Powell, Jr., *Contemporary Democratic Participation, Stability and Violence* (Cambridge, Massachusetts and London: Harvard University Press, 1982), hlm. 12.

DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, dan DPD yang selanjutnya membentuk MPR yang anggotanya terdiri dari anggota DPR dan DPD. Pemilihan umum pada tahun 1997 merupakan pemilihan umum terakhir dari rezim Orde Baru yang diikuti oleh tiga kontestan, yaitu Golongan Karya (Golkar), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), sementara pada masa reformasi telah dilaksanakan pemilihan umum empat kali, yaitu pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014 yang diikuti oleh lebih dari dua puluh partai politik.

Pada pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014, masyarakat Air Tiris memenangkan partai Golkar pada pemilihan umum, 2009 dan 2014. Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang kemudian berganti nama menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tetap berperan sebagai partai politik kecil. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang kemudian mengumumkan kembali sebagai partai Islam, mengalami penurunan perolehan suara yang signifikan, bahkan masyarakat cenderung meninggalkan partai ini dari pemilu ke pemilu. Sementara muncul partai-partai politik baru, di mana masyarakat menjatuhkan pilihannya, seperti Partai Amanat Nasional (PAN) yang menang pada pemilu 1999, Partai Bintang Reformasi (PBR) yang menang pada pemilu 2004, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Demokrat (PD). Terjadi kecenderungan perubahan orientasi politik masyarakat Air Tiris terhadap partai politik Islam.

Orientasi politik masyarakat Air Tiris memiliki dinamikanya tersendiri. Pada empat kali pemilihan umum, tahun 1999, 2004, 2009, dan 2014, orientasi politik masyarakat Air Tiris mengalami perubahan, orientasi politik

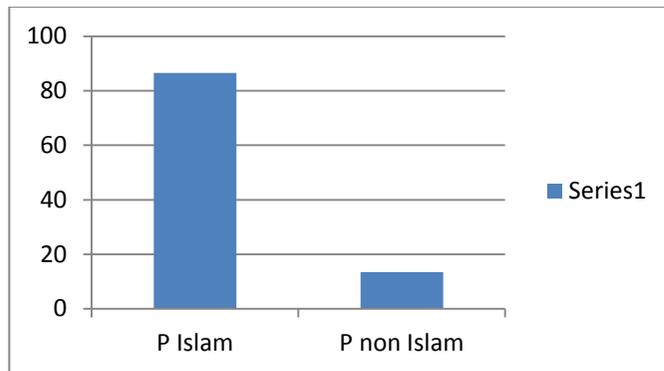
yang semula ditujukan kepada partai-partai politik Islam, lambat laun berubah dan bergerak ke partai-partai politik non Islam. Perolehan suara partai-partai politik Islam, sebesar masing-masing 86,53 %, 80,30 %, 46,72% dan 17,20% pada pemilihan umum 1999, 2004, 2009 dan 2014. Masyarakat Air Tiris adalah masyarakat yang seratus persen memeluk agama Islam, bahkan mendapat julukan sebagai “Serambi Mekah” kabupaten Kampar.

Masyarakat Air Tiris merupakan masyarakat yang antusias dalam menggunakan hak pilih mereka dalam setiap pemilihan umum. Partai politik silih berganti memenangi setiap pemilihan umum. Secara tradisional masyarakat santri Air Tiris orientasi politiknya cenderung menjatuhkan pilihan mereka pada partai-partai politik agama/Islam. Namun, orientasi politik demikian mengalami perkembangan dan perubahan yang cukup dinamis. Dinamika orientasi politik masyarakat Air Tiris dalam internal partai-partai Islam cukup tinggi, sementara dinamika orientasi masyarakat Air Tiris terhadap partai-partai politik Islam juga cukup tinggi dihadapkan pada partai-partai politik non agama/Islam.

Pemilihan umum tahun 1999, pemilihan umum pertama era reformasi yang diikuti 48 partai politik, di Air Tiris memunculkan enam partai pemenang. PAN, sebagai partai baru, tampil sebagai pemenang dengan mengantongi suara 43,84 %, disusul oleh PPP dengan memperoleh 35,11 %, naik satu persen dibanding pemilihan umum tahun 1997. Partai Golkar mengalami kemerosotan tajam dibanding perolehan suara pada pemilihan umum 1997, dengan hanya memperoleh 11,19 % suara. PDIP tak beranjak dan memperoleh 2,28 % suara. Di samping PAN, partai baru yang memperoleh

suara adalah Partai Keadilan (PK) dan Partai Bulan Bintang (PBB). PK memperoleh suara 4,66 % dan PBB 2,92 % suara. Dalam pemilihan umum ini kelompok partai Islam yang terdiri dari PAN, PPP, PK dan PBB memperoleh 86,53 % suara dan partai non Islam yang terdiri dari Partai Golkar dan PDIP memperoleh 13,47 % suara.

Gambar 3.10.
Orientasi Politik Masyarakat Air Tiris pada Pemilihan Umum 1999

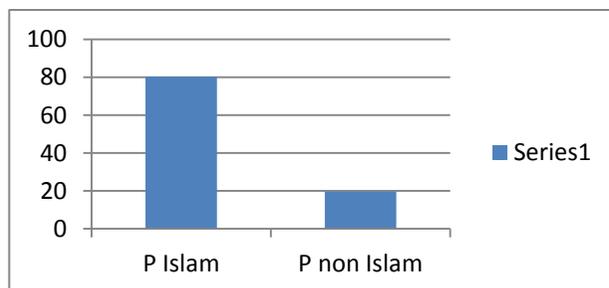


Sumber : Diolah dari PPK Kampar

Pemilihan umum tahun 2004 menunjukkan fenomena baru. Partai politik baru yang didirikan oleh ulama kondang KH. Zainuddin MZ, Partai Bintang Reformasi (PBR), tampil sebagai pemenang dengan memperoleh suara 41,00 %. PPP mengalami penurunan drastis dan hanya memperoleh 11,6 % suara, Partai Golkar tak beranjak dari perolehan suara pemilihan umum sebelumnya, memperoleh suara 10,9 %. PDIP bersama dengan partai lainnya, termasuk Partai Demokrat (PD) hanya memperoleh 8,80 % suara. PBB mengalami

peningkatan menjadi 8,7 % suara, PKS juga mengalami peningkatan menjadi 9,3 % suara. Sementara PAN yang pada pemilihan umum 1999 tampil sebagai pemenang, pada pemilihan umum 2004 ini mengalami penurunan yang tajam dan hanya memperoleh 9,7 % suara. Dalam pemilihan umum ini kelompok partai Islam yang terdiri dari PBR, PAN, PPP, PKS dan PBB memperoleh 80,30 % suara dan partai non Islam yang terdiri dari Partai Golkar, PD dan PDIP memperoleh 19,70 % suara.

Gambar 3.11.
Orientasi Politik Masyarakat Air Tiris pada Pemilihan Umum 2004

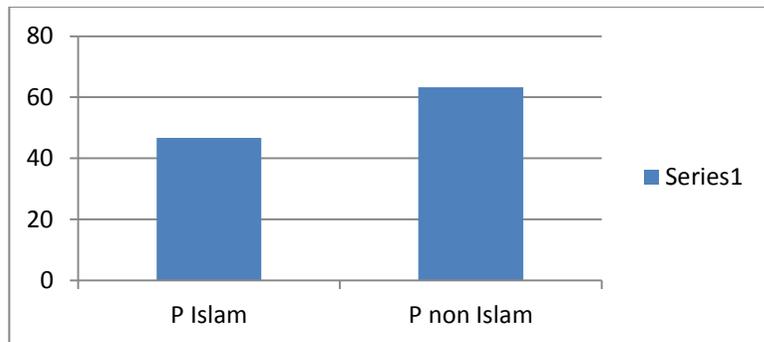


Sumber : Diolah dari PPK Kampar

Pemilihan umum 2009 Partai Golkar menjadi pemenang dengan meraih 46,22 % suara. PPP mengalami penurunan yang cukup tajam dan hanya meraih 4,7 % suara. PDIP bersama partai lainnya hanya memperoleh 5,7 % suara. PBR mengalami kemerosotan dengan hanya memperoleh 20,3 % suara. PBB dan PKS mengalami penurunan dan masing-masing memperoleh suara 6,3 % dan 7,41 %. PD yang pada pemilihan umum sebelumnya tidak memperoleh simpati masyarakat, pada pemilihan

umum 2009 ini memperoleh suara yang cukup besar yaitu 11,36 %. Dalam pemilihan umum ini kelompok partai Islam yang terdiri dari PBR, PAN, PPP, PKS dan PBB memperoleh 46,72% suara dan partai non Islam yang terdiri dari Partai Golkar, PD dan PDIP memperoleh 63,28 % suara.

Gambar 3.12.
Orientasi Politik Masyarakat Air Tiris pada Pemilihan Umum 2009

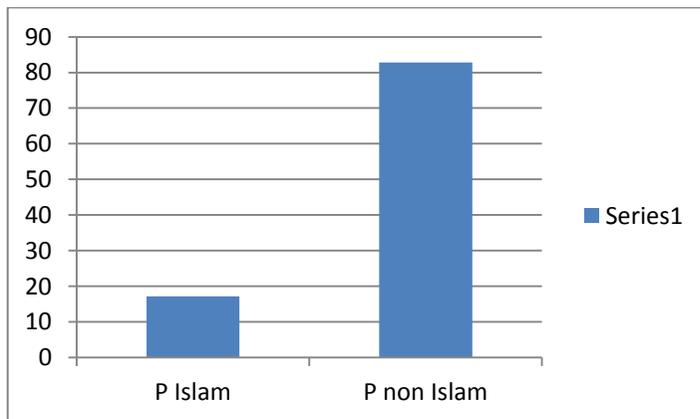


Sumber : Diolah dari PPK Kampar

Pemilihan umum 2014 merupakan pemilihan umum terburuk bagi partai-partai politik Islam dimana mengalami penurunan drastik. Pada pemilihan umum ini partai-partai Islam hanya memperoleh 17, 2%. Perolehan suara partai-partai politik Islam ini terdiri dari PKB 8,0%, PKS 1,5%, PAN 3,9%, PPP 2,9%, dan PBB 09% . Sementara partai-partai politik non Islam perolehan suaranya meningkat tajam mencapai 82,8%. Perolehan suara partai-partai politik non Islam ini terdiri dari Partai NasDem 16,6%, PDIP

1,4%, Partai Golkar 56,7%, Partai Gerindra 3,4%, Partai Demokrat 3,2%, Partai Hanura 0,4% dan PKPI 0,1%. Perolehan suara partai-partai non Islam ini merupakan prestasi terbaik dalam pemilihan umum di Air Tiris.

Gambar 3.13.
Orientasi Politik Masyarakat Air Tiris pada Pemilihan Umum 2014



Sumber : Diolah dari PPK Kampar